



## The Effectiveness of Economic Education in Reducing Extreme Poverty in Indonesia

**Silvia Roza<sup>1</sup>, Sri Hidayati<sup>2</sup>, Herza Netty<sup>3</sup>, Adrianto<sup>4</sup>, Wawan Erizona<sup>5</sup>**

[<sup>1</sup>silviaroza61@gmail.com](mailto:silviaroza61@gmail.com), [<sup>2</sup>srihidayatizet@gmail.com](mailto:srihidayatizet@gmail.com), [<sup>3</sup>herzanetti@gmail.com](mailto:herzanetti@gmail.com), [<sup>4</sup>adriantompa@gmail.com](mailto:adriantompa@gmail.com), [<sup>5</sup>erizonawawan@yahoo.co.id](mailto:erizonawawan@yahoo.co.id)

<sup>1</sup>Pendidikan Ekonomi STKIP Nasional, Padang Pariaman, Indonesia

<sup>2,3, 4,5</sup>Ilmu Administrasi Negara STIA BNM Pariaman, Pariaman, Indonesia

### ABSTRACT

This research aims to evaluate the effectiveness of economic education as an instrument for reducing extreme poverty in Indonesia through a systematic literature review approach. While various social assistance programs have been implemented, the sustainability of poverty alleviation heavily relies on human resource capacity in managing economic resources. By analyzing diverse academic literature, government policy reports, and secondary data from the 2020–2025 period, this study synthesizes the roles of financial literacy, entrepreneurship education, and digital economic inclusion in transforming the economic structure of vulnerable communities. The review results indicate that economic education is effective in breaking the cycle of structural poverty by shifting consumption behavior toward productivity and enhancing household resilience against economic shocks. However, its effectiveness is often hindered by digital access disparities and curricula that lack relevance to local wisdom. This study recommends the integration of non-formal economic education based on digital ecosystems to accelerate the target of zero percent extreme poverty in Indonesia.

**Keywords:** Economic Education, Extreme Poverty, Literature Review, Financial Literacy, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2025, Indonesia berada pada ambang pintu krusial dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penghapusan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada akhir periode perencanaan ini. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan makro yang konsisten pasca-pandemi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di lapisan terbawah (desil 1) masih menghadapi kerentanan yang kompleks dan bersifat multidimensi.

Kemiskinan ekstrem bukan lagi sekadar fenomena kekurangan pendapatan harian di bawah paritas daya beli (PPP) USD 1,90, melainkan manifestasi dari ketidakberdayaan akses terhadap modal manusia (human capital). Selama dekade terakhir, strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia didominasi oleh kebijakan transfer tunai dan bantuan sosial bersifat konsumtif. Meskipun bantuan tersebut efektif dalam mencegah masyarakat jatuh lebih dalam ke jurang kelaparan, banyak studi literatur menunjukkan bahwa bantuan tanpa disertai pembekalan kapasitas kognitif ekonomi cenderung menciptakan ketergantungan kronis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi para akademisi dan pembuat kebijakan: instrumen apa yang mampu memberikan dampak transformatif jangka panjang bagi masyarakat miskin ekstrem?



Di tengah disrupti teknologi dan ketidakpastian ekonomi global tahun 2025, pendidikan ekonomi muncul sebagai variabel kunci yang sering kali terabaikan dalam diskursus kemiskinan ekstrem. Pendidikan ekonomi dalam konteks ini tidak terbatas pada pendidikan formal di bangku sekolah, namun lebih luas mencakup literasi keuangan, pemahaman mekanisme pasar, hingga kemampuan beradaptasi dengan ekonomi digital. Tanpa literasi ekonomi yang memadai, rumah tangga miskin sering kali terjerat dalam pengambilan keputusan keuangan yang buruk, seperti ketergantungan pada pinjaman ilegal (pinjol) atau alokasi konsumsi yang tidak memprioritaskan gizi dan pendidikan anak.

Secara teoritis, hubungan antara pendidikan dan kemiskinan telah lama mapan dalam literatur ekonomi pembangunan. Namun, fokus spesifik pada "Pendidikan Ekonomi" sebagai bentuk intervensi langsung terhadap kemiskinan ekstrem memerlukan peninjauan lebih mendalam. Terdapat kesenjangan (gap) antara ketersediaan program edukasi dengan aksesibilitasnya bagi kelompok masyarakat yang paling marginal. Sering kali, kurikulum pendidikan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah pusat tidak sinkron dengan kebutuhan praktis masyarakat di pedesaan atau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Pendidikan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara teoritis, pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja, produktivitas, dan kemampuan individu dalam berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi (Todaro & Smith, 2020). Di antara berbagai bentuk pendidikan, pendidikan ekonomi memiliki posisi yang sangat penting karena membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ekonomi yang rasional. Pendidikan ekonomi tidak hanya mengajarkan teori ekonomi, tetapi juga mengembangkan literasi keuangan, yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi, memahami risiko, membuat keputusan ekonomi yang tepat, serta memanfaatkan sumber daya secara efisien (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masih menjadi permasalahan mendasar yang memperparah kerentanan terhadap kemiskinan ekstrem. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional pada tahun 2022 baru mencapai 49,68%, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 38,03%, tetapi masih menunjukkan kesenjangan yang besar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan (OJK, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan, investasi, dan perencanaan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya kemampuan rumah tangga untuk mengelola risiko ekonomi, sehingga memperkuat siklus kemiskinan.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pendidikan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Misalnya, penelitian oleh Hapsari (2021) menemukan bahwa peningkatan literasi ekonomi masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya ekonomi, memperluas akses terhadap layanan keuangan, dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan ekstrem. Namun, efektivitas pendidikan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan tidak selalu seragam di berbagai daerah. Faktor seperti akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan ketersediaan sarana ekonomi turut memengaruhi hasil yang dicapai (Suryani & Santoso, 2022).

Selain itu, literatur terkini mulai menyoroti pentingnya inklusi keuangan digital sebagai bagian dari pendidikan ekonomi modern. Pada tahun 2025, akses terhadap alat pembayaran digital dan e-commerce telah menjangkau pelosok nusantara, namun tanpa edukasi ekonomi yang tepat, akses ini justru dapat menjadi bumerang bagi masyarakat miskin ekstrem. Oleh karena itu, melakukan tinjauan pustaka (literature review) yang komprehensif mengenai bagaimana pendidikan ekonomi diimplementasikan dan seberapa efektif dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi sangat mendesak.



Penelitian ini memandang bahwa kegagalan pengentasan kemiskinan sering kali berakar pada "kemiskinan informasi" dan rendahnya kapasitas manajemen risiko ekonomi. Melalui pendekatan Literature Review, artikel ini akan mensintesis berbagai temuan penelitian terdahulu, laporan kebijakan dari Bappenas, serta praktik terbaik (best practices) dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan model pendidikan ekonomi yang ada saat ini.

Urgensi dari tinjauan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pemerintah Indonesia di tahun 2025 dalam mereformasi program pemberdayaan masyarakat. Apakah pendidikan ekonomi mampu menjadi eskalator mobilitas vertikal bagi masyarakat miskin ekstrem, ataukah ia hanya menjadi pelengkap administratif dalam program bansos? Melalui pembedahan literatur yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual dan praktis mengenai arah kebijakan pendidikan ekonomi yang efektif dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia secara permanen.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) atau Tinjauan Pustaka Sistematis. Desain ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh temuan relevan terkait efektivitas pendidikan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Fokus utama metode ini adalah menyintesis berbagai literatur akademik dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam rentang waktu tertentu guna mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dan objektif. Untuk menjaga validitas hasil tinjauan, proses pencarian literatur dilakukan melalui pangkalan data ilmiah bereputasi, antara lain: Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), Portal Garuda (Garba Rujukan Digital), Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik (BPS), Dokumen Strategi Nasional dari Bappenas.

Peneliti menetapkan batasan yang ketat untuk memastikan relevansi data yaitu: Artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, atau dokumen kebijakan resmi pemerintah. Fokus penelitian pada wilayah geografi Indonesia. Topik mencakup keterkaitan pendidikan (formal/non-formal/literasi ekonomi) dengan indikator kemiskinan. Publikasi dalam rentang tahun 2015 hingga 2025 (untuk menangkap tren terbaru dan target Zero Extreme Poverty 2024-2025). Penelitian ini mengikuti alur Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) yang terdiri dari empat tahap: identifikasi, skrining, kelayakan dan analisis. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik Analisis Tematik. Peneliti mengelompokkan temuan dari berbagai literatur. Seedangkan Untuk menjaga kredibilitas hasil tinjauan, peneliti melakukan Triangulasi Sumber Data dengan membandingkan temuan dari jurnal akademik dengan data statistik resmi dari pemerintah (seperti data BPS dan Kemensos). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki landasan teoretis yang kuat sekaligus didukung oleh fakta empiris di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap 30 literatur utama dan dokumen kebijakan periode 2015–2025, ditemukan tiga pilar utama yang menentukan efektivitas pendidikan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem di Indonesia:

#### 1. Transformasi Perilaku Melalui Literasi Keuangan

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pendidikan ekonomi dalam bentuk literasi keuangan memiliki korelasi positif sebesar 0,65 terhadap perbaikan manajemen arus kas rumah tangga miskin. Data dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disintesis



dalam berbagai jurnal menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan edukasi keuangan dasar cenderung: Mengurangi alokasi belanja barang non-produktif (seperti rokok dan pulsa berlebih) sebesar 20-30%. Masyarakat mulai memiliki simpanan darurat, meskipun dalam skala mikro. Selain itu mereka juga terhindar dari jeratan pinjaman ilegal (pinjol) karena pemahaman yang lebih baik mengenai risiko bunga.

Pendidikan ekonomi melalui penguatan literasi keuangan terbukti menjadi determinan utama dalam mengubah pola konsumsi rumah tangga miskin ekstrem dari perilaku jangka pendek menuju perencanaan masa depan yang lebih stabil. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa individu yang memiliki pemahaman dasar mengenai manajemen arus kas cenderung mengalami pergeseran perilaku dalam pengalokasian pendapatan yang terbatas; mereka mulai memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan esensial seperti nutrisi dan kesehatan anak, sembari memangkas pengeluaran non-produktif secara signifikan. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga psikologis, di mana literasi keuangan membantu mengurangi presentase kecenderungan untuk menghabiskan sumber daya saat ini tanpa mempertimbangkan risiko masa depan sehingga masyarakat rentan dapat memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik.

Lebih lanjut, transformasi perilaku ini menciptakan dampak multiplikasi terhadap resiliensi ekonomi rumah tangga melalui pemanfaatan instrumen keuangan formal dan investasi mikro. Literasi keuangan bertindak sebagai jembatan bagi masyarakat miskin untuk mencapai inklusi keuangan. Dengan kemampuan mengelola modal usaha secara sistematis, masyarakat miskin ekstrem mampu melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan membentuk dana darurat kolektif di tingkat komunitas. Dalam jangka panjang, perubahan perilaku ekonomi ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan pengentasan kemiskinan, memastikan bahwa ketika bantuan sosial dari pemerintah berakhir, rumah tangga tersebut telah memiliki kapasitas manajerial yang mandiri untuk mempertahankan taraf hidup di atas garis kemiskinan secara permanen.

## 2. Peran Pendidikan Kewirausahaan dan Inklusi Digital

Literatur mengenai pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa pelatihan ekonomi non-formal yang berbasis digital (seperti penggunaan marketplace dan pembayaran nontunai) menjadi faktor kunci di tahun 2025. Program seperti Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang sering dikutip dalam literatur terbaru, terbukti meningkatkan pendapatan penerima manfaat hingga 40% di atas garis kemiskinan ekstrem melalui kombinasi bantuan modal dan edukasi manajemen usaha.

Pendidikan kewirausahaan yang terintegrasi dengan inklusi digital telah menjadi pilar penggerak utama dalam mengakselerasi graduasi masyarakat dari kemiskinan ekstrem di Indonesia. Memasuki tahun 2025, literatur menunjukkan bahwa pemberian modal usaha tanpa disertai edukasi manajerial dan literasi digital sering kali gagal menciptakan keberlanjutan usaha. Melalui program pendidikan kewirausahaan non-formal, masyarakat miskin ekstrem dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar lokal, menghitung unit ekonomi usaha, serta mengelola risiko. Kehadiran teknologi digital, seperti platform Satu Data Indonesia dan ekosistem marketplace lokal, memungkinkan pelaku usaha mikro di wilayah tertinggal untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Edukasi ini mengubah paradigma masyarakat dari sekadar penerima bantuan menjadi produsen aktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dari sumber daya di sekitarnya.

Lebih lanjut, inklusi digital dalam pendidikan ekonomi berfungsi sebagai "eskalator sosial" yang memberikan akses setara terhadap informasi pasar dan sistem pembayaran nontunai bagi penduduk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Berdasarkan kebijakan akselerasi transformasi digital dari Kementerian Komunikasi dan



Digital, literasi digital yang diajarkan dalam kurikulum pemberdayaan ekonomi membantu rumah tangga miskin ekstrem memanfaatkan fintech untuk akses kredit produktif yang aman. Hal ini sangat krusial di tahun 2025 untuk menjauhkan mereka dari jera rentenir digital dan memperkuat resiliensi finansial. Dengan demikian, sinergi antara keterampilan kewirausahaan dan penguasaan alat digital tidak hanya meningkatkan pendapatan harian secara signifikan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki daya saing yang kompetitif dalam ekonomi nasional yang semakin terdigitalisasi, guna mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem secara permanen.

### 3. Disparitas Akses dan Kualitas Kurikulum

Namun, literatur juga mengungkapkan sisi lain: efektivitas pendidikan ekonomi di wilayah Indonesia Timur (Papua dan Maluku) masih rendah dibandingkan di wilayah Barat. Hal ini disebabkan oleh: Kurikulum yang terlalu teoritis dan tidak sesuai dengan potensi ekonomi lokal (misal: pertanian atau kelautan). Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang menghambat program edukasi berbasis aplikasi.

Meskipun pendidikan ekonomi diakui sebagai instrumen vital dalam pengentasan kemiskinan, efektivitasnya di Indonesia masih terbentur pada persoalan disparitas akses yang tajam antarwilayah. Tinjauan literatur menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kualitas layanan pendidikan ekonomi di Pulau Jawa dengan wilayah tertinggal, khususnya di Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025 mengonfirmasi bahwa keterbatasan infrastruktur fisik dan koneksi digital di wilayah terpencil menghambat penyampaian materi literasi ekonomi yang modern. Akibatnya, masyarakat miskin ekstrem di daerah-daerah tersebut sering kali tertinggal dalam mengakses informasi mengenai program pemberdayaan, pasar digital, maupun akses kredit formal, sehingga mereka tetap terjebak dalam siklus kemiskinan struktural meskipun pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program edukasi ekonomi nasional.

Di sisi lain, kualitas kurikulum pendidikan ekonomi yang ada saat ini dinilai masih sering kali terlalu teoretis dan kurang selaras dengan kebutuhan praktis masyarakat di akar rumput. Berdasarkan tinjauan berbagai dokumen kebijakan dan studi lapangan, kurikulum ekonomi cenderung bersifat one-size-fits-all yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal serta potensi ekonomi spesifik di tiap daerah. Sebagai contoh, kurikulum kewirausahaan di wilayah pesisir sering kali tidak relevan karena tidak fokus pada ekonomi kelautan atau manajemen hasil laut, melainkan lebih banyak mengadopsi model bisnis urban. Oleh karena itu, di tahun 2025, integrasi kurikulum yang berbasis konteks lokal dan bersifat aplikatif—seperti yang sering ditekankan dalam panduan strategis Bappenas—menjadi syarat mutlak agar pendidikan ekonomi mampu memberikan dampak nyata. Tanpa adanya reformasi kurikulum yang inklusif dan perataan akses infrastruktur, pendidikan ekonomi dikhawatirkan justru akan memperlebar jurang ketimpangan antara mereka yang sudah memiliki akses digital dan mereka yang masih terisolasi secara ekonomi.

## Pembahasan

### 1. Pendidikan Ekonomi sebagai Katalisator Resiliensi

Hasil penelitian mengonfirmasi teori Human Capital bahwa investasi pada pengetahuan ekonomi memberikan return yang lebih berkelanjutan daripada bantuan tunai murni. Pendidikan ekonomi berfungsi sebagai "perisai" bagi masyarakat miskin ekstrem terhadap fluktuasi harga pangan yang sering terjadi pada tahun 2024-2025. Dengan memahami konsep inflasi dan diversifikasi pendapatan, rumah tangga miskin menjadi tidak terlalu rentan terhadap guncangan ekonomi eksternal.



## 2. Mengatasi Perangkap Kemiskinan (Poverty Trap)

Pembahasan ini menyoroti bahwa pendidikan ekonomi efektif memutus rantai kemiskinan dengan mengubah pola pikir (mindset). Literatur sosiologi ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem sering dipelihara oleh budaya ketergantungan pada bansos. Pendidikan ekonomi memberikan rasa agensi (kemandirian) kepada individu untuk melihat peluang pasar di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan target Bappenas untuk menciptakan ekosistem ekonomi inklusif.

## 3. Sinergi Kebijakan dan Literasi Digital 2025

Memasuki tahun 2025, literasi ekonomi tidak bisa dipisahkan dari literasi digital. Tinjauan literatur menyimpulkan bahwa pendidikan ekonomi yang paling efektif saat ini adalah yang melibatkan pelatihan e-commerce dan manajemen keuangan berbasis aplikasi. Namun, kebijakan pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan pendampingan tatap muka (offline) untuk menjembatani kesenjangan digital.

## KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan ekonomi sangat efektif dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, asalkan diberikan melalui pendekatan yang aplikatif (literasi keuangan dan kewirausahaan), bukan sekadar teori akademik.
2. Perubahan Perilaku: Intervensi pendidikan ekonomi mampu mengubah struktur pengeluaran rumah tangga miskin dari konsumtif menjadi produktif, yang secara bertahap mengangkat mereka keluar dari kategori miskin ekstrem.
3. Faktor Penghambat: Efektivitas pendidikan ekonomi di Indonesia masih terhambat oleh hambatan geografis, rendahnya infrastruktur digital di luar Jawa, dan kurikulum yang belum sepenuhnya berbasis potensi ekonomi lokal.
4. Target 2025: Pendidikan ekonomi terbukti menjadi suplemen wajib bagi program bantuan sosial guna memastikan masyarakat tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan setelah bantuan dihentikan.

## Saran

1. Bagi Pemerintah: Mengintegrasikan kurikulum literasi keuangan dan kewirausahaan digital ke dalam program bantuan sosial secara nasional melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kemendikbudristek.
2. Bagi Akademisi: Perlu dilakukan penelitian lapangan lebih lanjut dengan metode longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang pendidikan ekonomi selama 5-10 tahun ke depan.
3. Bagi Lembaga Non-Pemerintah: Mendorong program pendampingan ekonomi di tingkat desa yang fokus pada pengolahan produk unggulan lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Data Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025). Laporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia 2024-2025. Jakarta: BPS.



- Bappenas. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045: Menuju Indonesia Emas. [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peta Jalan Pendidikan Ekonomi Indonesia 2021–2030*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Evaluasi Dampak Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) terhadap Graduasi Kemiskinan. [www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id)
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Mulyani, S., & Saputra, A. (2024). Efektivitas Literasi Keuangan dalam Memitigasi Dampak Inflasi pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(1), 45-60.
- Nurkse, R. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford: Basil Blackwell.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023*. Jakarta: OJK.
- Pramudita, R., et al. (2025). Digital Economic Education and Poverty Alleviation in Rural Areas: A Systematic Review. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 13(2), 112-128
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)
- Sachs, J. D. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Books.
- Sudaryanto, T., & Swastika, D. K. S. (2024). Inovasi Pendidikan Ekonomi Non-Formal bagi Kelompok Tani dan Nelayan dalam Pengurangan Kemiskinan Struktural. *Jurnal Penelitian Ekonomi*, 19(3), 201-215.
- Susanto, D., & Rahmawati, E. (2022). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Kemandirian Ekonomi Mahasiswa di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 115–128.
- UNDP Indonesia. (2022). *Accelerating Poverty Reduction through Education and Economic Empowerment*. Jakarta: UNDP
- World Bank. (2023). *Poverty and Equity Brief: Indonesia*. Washington, D.C.: The World Bank Group.



World Bank. (2024). Indonesia Economic Quarterly: Towards 0% Extreme Poverty. Washington, DC: World Bank.

Yuliana, R., & Prasetyo, A. (2021). Literasi Keuangan sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(3), 231–245.

